

PEMKOT GULIRKAN HIBAH PENGAMANAN KE KODIM DAN POLRESTA

Optimis Pilkada Kota Yogya 2024 Lebih Kondusif

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya optimis gelaran Pilkada 2024 akan lebih kondusif. Hal ini berka-ca pada pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2024 lalu yang jauh lebih kondusif dibandingkan gelaran yang sama lima tahun sebelumnya.

Optimisme tersebut disam-paikan Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo usai menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada 2024. "Saya semakin yakin penye-lenggaraan pilkada serentak

nanti juga akan lebih kon-dusif, aman dan tertib," tandasnya di sela penandatanganan NPHD di Balaikota Yogya, Kamis (14/3).

NPHD pengamanan Pilkada 2024 diberikan ke-pada Kodim 0734 Kota Yogya dan Polresta Yogya. Kodim

0734 Kota Yogya mendapat alokasi hibah sebesar Rp 876.780.000. Sedangkan Pol-resta Yogya memperoleh hi-bah sebanyak Rp 1.125.000.000. Besaran hibah yang diterima tersebut berdasar-kan pengajuan atas rencana penggunaan yang disampai-kan sebelumnya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogya.

Singgih mengaku, berkaca pada Pileg dan Pilpres 2024 lalu, hampir tidak ada gejala yang perlu mendapatkan per-hatian intensif. Kondisinya jauh berbeda pada Pilpres 2019 lalu lantaran terjadi gesekan fisik di Kota Yogya. "Kalau di 2019 lalu kondisiny-a agak mecekam. Kemari-n (2024) ini sangat kondusif sekali. Memang ada potensi tapi itu juga kecil. Makanya, semoga nanti di Pilkada 2024 yang akan digelar pada akhir tahun bisa lebih kondusif la-gi," harapnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap dana hibah penga-

manan pilkada bisa diman-faatkan sejak pada proses persiapan, pelaksanaan hing-ga pascapelaksanaan.

Sementara itu, baik Dandim 0734 Kota Yogya Letkol Arh Burhan Fajari Arfian SSos, maupun

Kapolresta Yogya Kombes Pol Aditya Surya Dharma SIK, juga mengaku gelaran Pilpres 2024 relatif aman dan

kondusif. Keduanya bertekad untuk menjaga situasi tetap kondusif dalam gelaran Pilkada 2024 nanti. (Dhi)-f



KR-Ardhi Wahdan

Pj Walikota bersama Dandim dan Kapolresta Yogya menandatangani naskah NPHD pengamanan pilkada di dampingi unsur Forkompinda Kota Yogya.

Disperindag DIY Lakukan Operasi Pasar Secara Berkala

YOGYA (KR) - Guna menstabilkan harga kebutuhan pokok dan memastikan pasokan berjalan lancar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY gencar melakukan operasi pasar (OP). Untuk pelaksanaan OP yang pertama dilakukan di tiga titik pasar tradisional Gunungkidul yaitu Wonosari, Semin, dan Playen pada Rabu (13/3).

"Sejumlah upaya terus kami lakukan untuk menstabilkan harga sembako dan memastikan pasokannya lancar. Salah satunya dengan operasi pasar yang langsung menasar para pedagang. Kami berharap dengan cara ini distribusi barang bisa lebih cepat, sehingga harga kebutuhan pokok bisa stabil. Dengan begitu kami berharap bisa sedikit meringankan beban masyarakat," kata Kepala Disperindag DIY Syam Arjayanti di Yogyakarta, Kamis (14/3).

Syam mengatakan, saat bulan Ramadan

seperti sekarang harga bahan pokok di pasaran masih tergolong tinggi terutama untuk jenis beras. Harga beras paling murah Rp 14.000 per kilogram untuk jenis medium, sementara beras premium antara Rp 16.000 hingga Rp 17.000 per kilogram. Kendati demikian, diharapkan harga tersebut dalam waktu dekat bisa segera turun. Karena saat ini di sejumlah wilayah di DIY sudah memulai panen. Dengan demikian diharapkan bisa menambah pasokan beras dari DIY. Adapun komoditas lain yang harganya masih tinggi berdasar pergerakan harga dari link <https://sp2kp.kemendag.go.id> seperti cabai merah besar diangka Rp 86.900 per kilogram, cabai merah Rp 59.800 per kilogram, cabai merah keriting Rp 59.600 per kilogram. Diikuti telur ayam ras Rp 31.100, daging ayam ras Rp 39.000 per kilogram, gula pasir Rp 17.100 per kilogram. (Ria)-f

DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

Wifi Publik Harus Dongkrak Produktivitas Warga

YOGYA (KR) - Hingga awal tahun ini Pemkot Yogya berhasil memasang 1.064 titik wifi publik yang tersebar di wilayah. Keberadaannya diharapkan mampu mendongkrak produktivitas serta kreativitas warga dari segi yang positif.

Pimpinan Komisi A DPRD Kota Yogya Indaruwanto Eko Cahyono, menyebut dari aspek kuantitas jumlahnya sudah merata di tiap RW yang berjumlah 617 RW di Kota Yogya. Akan tetapi dari aspek kualitas, keberadaannya harus terus dievaluasi agar tidak mubadzir. "Jangan sampai hanya sekadar untuk melengkapi ruang publik saja atau justru banyak dimanfaatkan untuk berselancar media sosial. Tetapi bagaimana sekarang lebih fokus karya yang produktif seperti mendukung geliat ekonomi digital, pembuatan konten dan lain sebagainya," jelasnya.

Oleh karena itu, Ketua Fraksi PAN ini berharap OPD terkait bisa bersinergi. Infrastruktur yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) tersebut harus ditangkap oleh OPD lain agar saling mengisi. Terutama dalam hal pengembangan sumber daya manu-

Indaruwanto Eko Cahyono
Pimpinan Komisi A



KR-Istimewa

sia kaitannya dalam iklim digital. Dengan begitu, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah mampu memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Selain itu, Ndaru sapaan akrabnya, mengatakan semua elemen masyarakat seharusnya juga bisa memanfaatkan wifi publik. Khususnya bagi kaum ibu yang belum banyak tersentuh dalam pengaplikasiannya. Pasalnya, sela-

ma ini banyak dimanfaatkan oleh bapak-bapak maupun anak-anak. "Misalnya kaum ibu ini diberikan pelatihan digital marketing untuk menambah pendapatan keluarga. Sehingga ketika berada di ruang publik bisa tetap berkegiatan dengan dukungan wifi publik ini," tandasnya.

Ndaru juga berharap dari aspek jumlah dan kecepatan, bisa terus ditambah. Jika saat ini basisnya masih mendasarkan pada RW atau kampung, maka tahun ini harapannya bisa merata hingga tiap RT. Meski harus menambah hingga 1.000 titik baru, namun beban APBD bisa ditekan manakala Pemkot mau menggandeng CSR. Pasalnya, banyak industri telekomunikasi yang mengambil untung di Kota Yogya sehingga memiliki kewajiban dalam menyalurkan tanggung jawab sosial perusahaan.

"Dari segi kecepatan juga bisa ditambah. Sekarang ini sebenarnya sudah mencukupi dengan 20 Mbps. Tetapi jika bisa ditambah lagi, akan lebih bagus untuk mendukung kecepatan akses. Apalagi untuk login juga harus menggunakan aplikasi Jogja Smart Service (JSS) sehingga penggunaan secara riil time bisa dipantau oleh dinas," urainya. (Dhi)-f

MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN
DPRD KOTA YOGYAKARTA

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD BERHASIL DITETAPKAN

Jembatani Aspirasi Warga Jadi Prioritas Kegiatan



KR-Ardhi Wahdan

Ketua DPRD Kota Yogya Danang Rudiyatmoko.

YOGYA (KR) - Seiring tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di Kota Yogya yang memasuki tahap akhir, lembaga legislatif juga berhasil menuntaskan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogya. Melalui pokok-pokok pikiran dewan tersebut, aspirasi yang sudah disampaikan oleh masyarakat akan dijawab supaya menjadi prioritas kegiatan untuk segera direalisasikan.

Penetapan surat keputusan mengenai pokok-pokok pikiran DPRD Kota Yogya diagendakan melalui rapat paripurna pada Rabu (13/3) lalu. Dalam sidang tertinggi di level legislatif tersebut, seluruh peserta telah sepakat untuk segera diputuskan. "DPRD mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran dewan kepada walikota dalam mempersiapkan perumusan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)," ungkap Ketua DPRD Kota Yogya H Danang Rudiyatmoko, Kamis (14/3).

Sesuai mekanisme, RKPD disusun berdasarkan asas prioritas pembangunan. Kerangka utamanya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Aspirasi masyarakat juga turut diserap melalui tahapan musrenbang sejak di tingkat kelurahan, kemandren dan tingkat kota. Seluruh kelurahan di Kota Yogya yang mencapai 45 kelurahan, sudah menyelesaikan musrenbang. Hasilnya lantas diajukan dalam musrenbang tingkat kemandren dan tingkat kota untuk kemudian dijadikan landasan penyusunan RKPD.

Tahapan musrenbang tersebut menjadi ranah eksekutif atau pemerintah daerah. Sedangkan lembaga legislatif sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan juga memiliki peran yang sama berupa penjangkaran aspirasi. Selama ini penjangkaran aspirasi secara resmi dilakukan melalui agenda reses. "Pokok pikiran dewan ini hampir semuanya kami rangkum berdasarkan hasil dari kegiatan reses.



KR-Ardhi Wahdan

Ketua Pansus Pokok Pikiran Dewan Tri Waluko Widodo.

Dalam setahun ada beberapa kali reses sebagai ajang bagi wakil rakyat untuk bertemu konstituennya. Di sana anggota dewan mendengarkan masukan dan aspirasi sekaligus memaparkan program yang akan bergulir," urai Danang.

Aspirasi yang disampaikan oleh konstituen lantas disaring berdasarkan kelompok kegiatan. Mulai dari uraian masalah, lokasi, OPD teknis, volume, kebutuhan anggaran hingga jenis atau sub kegiatan. Bahkan guna mempertegas fungsi tersebut dibentuk panitia khusus (pansus) terkait penyusunan pokok pikiran dewan. Total ada 13 anggota pansus yang diketuai oleh Tri Waluko Widodo.

Danang menyebut, hasil kinerja pansus sudah ia terima sejak pekan lalu. Total ada 352 jenis usulan masyarakat yang dirangkum dalam pokok pikiran dewan. Setiap anggota dewan sebelumnya tidak dibatasi untuk menyampaikan usulan konstituen agar dimasukkan dalam pokok pikiran dewan. Hal ini karena setiap masyarakat yang menjadi konstituen anggota dewan berhak untuk menyampaikan usulan dan masukan bagi pengembangan di wilayahnya masing-masing. "Di beberapa daerah bahkan pokok pikiran dewan bisa mencapai ribuan usulannya. Tetapi kita hanya sekitar 352 usulan. Semoga apa yang sudah berjalan ini sesuai dengan harapan masyarakat sehingga usulan yang disampaikan juga menjadi prioritas untuk difasilitasi," ungkapnya.

Setelah pokok pikiran dewan ditetapkan, selanjutnya disampaikan ke tim eksekutif guna menjadi acuan dalam penyusunan RKPD. Harapannya setiap usulan masyarakat tersebut menjadi pertimbangan utama dalam penyelarasan rencana kegiatan yang diakomodasi oleh pemerintah.

Sementara Ketua Pansus Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Yogya Tri Waluko Widodo, menyebut 352 usulan yang telah disusun jenisnya cukup beragam. Tidak semua merupakan usulan dalam bentuk fisik melainkan banyak pula yang sifatnya



KR-Ardhi Wahdan

Penetapan keputusan pokok pikiran dewan oleh Ketua DPRD Kota Yogya.

justru untuk pengembangan sumber daya manusia yang ada di kampung. "Kalau yang sifatnya fisik biasanya seperti pemeliharaan saluran air hujan, penambahan CCTV publik dan pemasangan cermin cembung di tiap kampung. Itu merupakan kebutuhan yang sehari-hari memang dihadapi oleh masyarakat ketika beraktivitas di wilayah," jelasnya.

Munculnya usulan tersebut bukan lantas program pemerintah selama ini tidak menjangkau, melainkan lokasi sasaran bisa jadi belum merata. Ditambah, aktivitas masyarakat di kampung atau wilayah semakin tinggi sehingga membutuhkan sarana pendukung. Oleh karena itu, dirinya juga berharap usulan-usulan yang sifatnya kebutuhan di wilayah bisa menjadi prioritas untuk dipenuhi.

Di samping itu, Widodo, mengaku justru banyak usulan yang berupa pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia. Mulai dari pelatihan digital marketing, pelatihan pembuatan kue atau boga, pelatihan manajemen UMKM, pelatihan satpam dan lain sebagainya. Ada pula usulan agar perpustakaan keliling menjangkau hingga kampung karena banyaknya masyarakat yang sangat menantikan kehadirannya.

Kendati demikian, pokok pikiran dewan yang telah ditetapkan kali ini baru bisa diakomodasi pada tahun anggaran 2025. Hal ini karena ada mekanisme atau pentahapan dalam penyusunan dokumen anggaran negara. Program dan kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah pada tahun ini pun merupakan hasil musrenbang maupun pokok pikiran dewan yang diputuskan tahun lalu. "Jadi hasil pokok pikiran dewan ini akan masuk dalam pertimbangan RKPD 2025. Pemkot sudah menyelesaikan musrenbang wilayah, dan kami pun juga telah merampungkan penjangkaran aspirasi. Hasil musrenbang dan jaring aspirasi atau pokok pikiran dewan ini, lantas akan disandingkan untuk masuk dalam RKPD 2025," urainya. (Dhi)-f